

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF TRI HITA KARANA BERDASARKAN PERDA NOMER 17 TAHUN 2012 PADA KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM 2018

(Ni Wayan Supriyanti*) (I ketut Winaya**) dan (Nomy Yasintha***)

ABSTRACT

The development of the spatial layout of the region must be encouraged by the government, because our society is still not sure about spatial planning in accordance with the Karangasem Regional Regulation No. 17 of 2012. In order to avoid overlap between the community and the local government, residents in the village who are mostly religious Hinduism strongly believes in the Tri Hita Karana Philosophy. Tri Hita Karana's philosophy describes three concepts that are unique in a variety of cultures with the environment in the midst of globalization like today. The purpose of spatial planning in Karangasem regency is to realize the Karangasem region through the development of sustainable and environmentally sound agribusiness and tourism in the use of space that applies disaster mitigation aspects. So that a regional planner will not be able to master the entire regional planning process because it requires a lot of disciplines. Then the researcher will examine the problems that exist in the process of implementing the development plan of the Sidemen sub-district of Karangasem Regency. In its implementation, it demands the ability of the actors implementing the policy to build relationships in the causal chain so that public policy can have an impact on society.

Keywords: Policy Implementation, Spatial Planning, Development Planning

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat di Desa masih kurang memahami arti pentingnya alih fungsi lahan pada rencana pembangunan wilayah didesa. yang disebabkan masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah yang sigap untuk menanggulangi terjadinya kemungkinan bencana alam. Amlapura (Bali Post) Sejumlah Anggota DPRD asal daerah pemilihan Sidemen menolak lahan sawah di Kecamatan Sidemen dialihfungsikan menjadi bangunan hotel berbintang lima. Alasannya selain sawah di Karangasem kian terbatas, seharusnya sawah yang panoramanya indah berteras itu dijadikan aset daya tarik wisata.

Kabupaten Karangasem (Bapeda.Karangasem.go.id) sebuah kabupaten di bali yang masih memiliki potensi besardapat di kembangkan dalam kesejahteraan masyarakat dan berujung pada peningkatan kualitas hidup.meskipun demikian Karangasem belum memiliki suatu bentuk rencana pengembangan yang bersifat holistik, terintegrasi dan berkelanjutan Kabupaten yang membutuhkan sebuah rencana untuk menentukan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengembangan yang berdasarkan data valid yang terbaru atau termutakhir. Maka Pembangunan tata ruang wilayah itu harus dihimbau dari pemerintah, mengenai penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Karangasem Nomor 17 tahun 2012. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara masyarakat dan pemerintah setempat maka warga di desa yang sebageaian besar menganut kepercayaan agama hindu sangat percaya dengan Filosofi Tri Hita Karana.

Falsafah Tri Hita Karana memaknai tiga konsep yang memiliki keunikan dalam ragam berbudaya dengan lingkungan di tengah globalisasi seperti sekarang ini.

Berdasarkan problematika yang ada terkait dalam implementasi kebijakan rencana pembangunan wilayah kabupaten karangasem pada kecamatan sidemen akan sangat menarik untuk dikaji dan dilakukan analisis dalam mengatasi alih fungsi lahan dalam pembangunan di kecamatan sidemen terjadi penyimpangan dalam pembangunan dimana banyak lahan sawah yang habis telah dibangun per hotelan berbintang dan villa dari investor luar.

1.2 Rumusan Masalah :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Wilayah Dalam Perspektif Tri Hita Karana Berdasarkan Perda Nomer 17 Tahun 2012 Pada Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem?

1.3 SASARAN PROGRAM

Sasaran peneliti ini adalah mengembangkan keilmuan Program Studi Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik, Metode Penelitian Administrasi Negara dan mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi dari sisi kebijakan terkait dalam rencana pembangunan wilayah agar masyarakat setempat dapat mematuhi peraturan yang berlaku pada Perda Nomer 17 Tahun 2012.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di kabupaten Mamuju Utara yang di tulis oleh, Nasriaty N. Bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Metode yang dipakai dalam analisis yaitu Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dalam pembahasan untuk mengetahui Implementasi RTRW dalam Kebijakan ini menggunakan teori Grindle yang mencakup Content of Policy (isi kebijakan) dan Context Implementation (lingkungan implementasi). Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. Hasil yang dikemukakan menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan RTRW di Kabupaten Mamuju Utara tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang belum memiliki legalitas sebelum membangun, yang berarti bahwa perizinan dalam membangun belum dimiliki.

Teori

a. Arti Penting Kebijakan Publik

Donald F. Kettl (Nugroho, 2008:129) mengemukakan bahwa memasuki millennium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritical, yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*); proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik; nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon *entrepreneurial government*, dan kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik mememanajemeni urusan-urusan publik. Michael E. Porter (Nugroho, 2008:129) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya.

Menurut Nugroho (2008:129) dalam konteks persaingan global, tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang

kompetitif, bukan hanya secara domestik, melainkan global. Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola kebergantungan. Inilah makna strategis dari administrasi publik, dan administrasi publik sangat strategis dalam menghadapi millennium ketiga.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Pembagian pertama kebijakan publik dijabarkan dalam makna kebijakan publik, yaitu pertama hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik “memilih dan tidak memilih” dapat dipahami dalam matriks sebagai berikut menurut Nugroho (2008:134)

Tabel 2.1 Matriks Pilihan

	Kegiatan Strategis	Kegiatan Tidak/Kurang Strategis
Masyarakat mampu melaksanakan	I Pemerintah (dengan masyarakat)	II Masyarakat
Masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan	III Pemerintah	IV Masyarakat

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yang disebut konvensi-konvensi. Theodoro J. Lewi (Nugroho, 2008:135) membagi amatan kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan Substansi dan yang berkenaan dengan prosedur. Pembagian ketiga adalah karakter kebijakan publik yang sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Di sini, kebijakan publik dibagi menjadi dua menurut Nugroho (2008:138), yaitu:

- a. Kebijakan regulatif versus kebijakan deregulatif. Kebijakan ini menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan

dengan hal-hal yang regulatif/restriktik dan deregulatif/non-restriktif.

- b. Kebijakan alokatif dan kebijakan distributif. Kebijakan ini biasanya berupa kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik. Lebih jauh, pakar keuangan publik Richard A. Musgrave dan Peggi B. Musgrave (Nugroho, 2008:138) mengemukakan bahwa fungsi kebijakan keuangan publik adalah fungsi alokasi yang bertujuan mengalokasikan barang-barang publik dan mekanisme pasar, fungsi distribusi yang berkenaan dengan pemerataan kesejahteraan termasuk perpajakan, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dari kegiatan alokasi dan distribusi tersebut, dan fungsi koordinasi anggaran yang berkenaan dengan koordinasi anggaran secara horizontal dan vertikal.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat disederhanakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh publik untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui tiga tahap utama, yaitu proses penyusunan kebijakan, isi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Apabila memperhatikan proses kebijakan publik, maka implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik itu sendiri. Implementasi menurut Pramusinto (2014:12) merupakan kegiatan menerjemahkan isi kebijakan untuk dioperasionalisasikan, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan oleh para aktor pada saat proses penyusunan kebijakan.

Sebagaimana disampaikan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:146), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Selanjutnya menurut Subarsono (Pramusinto, 2014:13) implementasi merupakan suatu kegiatan yang kompleks, melibatkan banyak aktor, dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

- d. Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Wilayah Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (Taringan, 2010:49) memberikan definisi tentang ruang adalah wadah

yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara, dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Perencanaan ruang wilayah menurut (Taringan, 2010:49) adalah perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Perencanaan ruang wilayah ataupun penyusunan tata ruang wilayah dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan perkotaan dan nonperkotaan.

Landasan pengaturan penggunaan ruang wilayah Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah perlu campur tangan dalam pengaturan penggunaan lahan terdapat beberapa alasan pemerintah perlu campur tangan dalam mengatur penggunaan lahan menurut whitehead (Taringan, 2010:51) sebagai berikut:

- a.) Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan umum (*public good*), yang apabila diserahkan kepada mekanisme pasar, hal itu tidak akan tersedia atau ketersediaannya tidak sebanyak yang dibutuhkan .
- b.) Adanya faktor eksternalitas (*externalities*) dalam kegiatan manusia, yaitu adanya dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa merugikan atau menguntungkan masyarakat, tetapi tidak mempengaruhi penerimaan/pengeluaran institusi yang melakukan kegiatan tersebut.
- c.) Informasi yang tidak sempurna, menyangkut kondisi saat ini maupun tentang apa yang direncanakan orang saat ini untuk dilaksanakan di masa yang akan datang.
- d.) Daya beli masyarakat yang tidak merata sehingga ada pihak-pihak yang dapat menguasai lahan secara berlebihan tetapi ada pihak lain yang sulit mendapatkan lahan.
- e.) Perbedaan penilaian individu/masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai manfaat jangka pendek lebih penting ketimbang manfaat jangka

panjang.

3. METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Dalam ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi 1989:4). Untuk memperoleh data secara holistik, maka teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

- a) Observasi, yaitu teknik penelitian dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta mencatat dengan sistematis fenomena yang diamati. Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer mengenai upaya yang dilakukan oleh badan teknis daerah terkait penyelenggaraan governance di pemerintah daerah.
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dimana pihak penanya (*interviewer*) berhadapan langsung secara fisik dengan pihak yang ditanyai (*interviewee*). Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berpedoman pada daftar wawancara yang sudah dibuat / dipersiapkan sebelumnya (*interview guide*). Wawancara mendalam pada suatu penelitian bertujuan menghimpun keterangan tentang fenomena dalam masyarakat (Melly, 1994:129).
- c) Studi dokumen yaitu kegiatan melakukan analisis terhadap dokumen- dokumen atau data tertulis yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini.

b. Lokasi, Obyek dan Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem yang akan dilakukan berdasarkan *purposive sample*. DPRD Karangasem, Wakil Rakyat Pemerintah Daerah Karangasem Bali menjadi pusat penelitian untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif terkait kebijakan Rencana Pembangunan Wilayah di Karangasem.

Unit Analisis penelitian berada pada tingkat institusi dan individu, yaitu aparat birokrasi di lingkungan Kecamatan, kantor desa Sidemen Karangasem dan masyarakat atau tokoh adat setempat.

Tabel I Informan Penelitian

Informan	Alasan	Teknik pengumpulan data
DPRD Karangasem	Sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan rencana pembangunan wilayah Karangasem	Wawancara (<i>depth interview</i>)
Kepala CAMAT SIDEMEN KARANGASEM	Sebagai pihak pelaksana kebijakan di suatu daerah kecamatan.	Wawancara (<i>depth interview</i>) dan data sekunder
Kepala Desa	Sebagai pihak pelaksana kebijakan di Desa	Wawancara (<i>depth interview</i>) dan data sekunder
Masyarakat (Tokoh adat)	Sebagai Masyarakat wajib tahu dan patuh terhadap kebijakan RTRW	Wawancara terstruktur, observasi, dokumentasi

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung ke lokasi penelitian dan hasil wawancara terhadap instansi terkait, khususnya kepala dinas bersama warga masyarakat. Data primer, dilakukan melalui dua cara yakni, *Pertama* ; melalui observasi dimana penulis terjun langsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang seobyektif mungkin. *Kedua*, wawancara langsung, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak atau unsur-unsur dari obyek terkait, dan unsur-unsur tersebut dimintai keterangan sesuai dengan masalah yang dibahas. Wawancara dilakukan secara semistruktur, wawancara in tergolong dalam *in-depth interview*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2010:320).

d. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah dengan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahan intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris dengan langkah-langkah: 1) Pengumpulan data; 2) Penilaian data; 3) Interpretasi data; 4) Penyimpulan data terhadap hasil interpretasi data dan analisis data.

Gambaran Umum Potensi

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan serta peluang yang ada, maka visi kecamatan Sidemen dapat dijabarkan bahwa Secara topografi wilayah kecamatan sidemen sebagian daerahnya merupakan daerah pegunungan, batas-batas wilayah kecamatan sidemen dapat dijabarkan :

- Utara : Kecamatan Selat
- Timur : Kecamatan Manggis
- Selatan: Kabupaten Klungkung
- Barat : Kecamatan Rendang

Gambar 4.1
Peta kecamatan Sidemen



Secara administratif kecamatan Sidemen memiliki luas daerah yaitu 35,15 km² mewilayahi 10 desa/kelurahan terdiri dari :

Tabel 1
Nama Desa/Kelurahan

No	Nama Desa / Kelurahan	No	Nama Desa / Kelurahan
1.	Desa Kertha Buana	6.	Desa Talibeng
2.	Desa Lokasari	7.	Desa Tangkup
3.	Desa Sangkan Gunung	8.	Desa Telaga Tawang
4.	Desa Sidemen	9.	Desa Tri Eka Buana

5.	Desa Sinduwati	10.	Desa Wisma Kerta
----	----------------	-----	------------------

Sumber: Diolah oleh Penulis

Kecamatan Sidemen memiliki Jumlah penduduk sebanyak 30.117 jiwa, Sebagian besar penduduk di kecamatan sidemen bekerja sebagai petani sawah dan perkebunan untuk persawahan, petani lebih dominan menanam padi dan cabai, sedangkan dibidang perkebunan, petani membudidayakan salak, cengkeh, manggis, dan durian.

b. Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui harus mamu dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dengan falsafah Tri Hita Karana, pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn ruang kabupaten diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, sebagai matra ruang dari rencana pembangunan jangka Panjang daerah.

Tujuan penataan ruang di kabupaten Karangasem ialah mewujudkan wilayah Karangasem melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kota.
2. Acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

d. Strategi Pemerataan Pembangunan Wilayah Utara, Selatan, Timur, Barat Karangasem

1. Mengembangkan wilayah utara yang mempunyai keunggulan komperatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral .
2. Mengembangkan wilayah selatan dan timur mempunyai keunggulan komperatif di kembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industry kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan.
3. Mengembangkan wilayah barat mempunyai

keunggulan komperatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat wilayah pengembangan bali timur, dikembangkan pusat pertumbuhan ekonomi.

e. **Gambaran Umum Desa Sidemen**

Sejarah terbentuknya Desa Sidemen, kiranya kita tidak akan terlepas dari:; penurunan yang berbentuk tulisan serta peninggalan-peninggalan yang ada. Nama desa termasuk nama tempat yang ada di sekitarnya, bentuk pura-pura termasuk bangunannya, keadaan penduduk serta tata kehidupan masyarakatnya di tinjau dari seni dan budayanya. nama desa yaitu “*Sidemen*” kita akan memperoleh gambaran bahwa nama tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu “Sida” dan “Mahan” yang kalau dirangkai dari dua suku kata tersebut memiliki makna mencapai kebesaran, yang dalam hal ini adalah kebesaran ilmu penegetahuan kebathinan (Kayogi Swaran). Desa Sidemen telah berdiri sejak zaman Kerajaan Karangasem, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1843, menarik kesimpulan bahwa Desa Sidemen adalah desa tua dan merupakan cikal bakal berdirinya Kecamatan Sidemen serta desa Sidemen dulunya merupakan desa induk 3 (tiga) desa, yaitu : Desa Sidemen, Desa Telagatawang dan Desa Sinduwati diantara sepuluh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sidemen.

Desa Sidemen merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang tidak teratur seluas 4.000 Km², arah barat berbatasan dengan Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen, arah timur berbatasan dengan Desa Antiga Kecamatan Manggis, arah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegalatawang dan Desa Wismakerta Kecamatan Sidemen dan arah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen. Adapun jarak Desa Sidemen ke kecamatan kurang lebih 1 (satu) km. Desa Sidemen dengan Ibukota Kecamatannya Sidemen terletak pada batas-batas : sebelah utara adalah Desa Sinduwati, sebelah timur dengan Desa Antiga, sebelah selatan dengan Desa Telagatawang dan Desa Wismakerta, kemudian sebelah barat dengan Desa Sangkan Gunung dengan posisi geografis berada pada 115⁰ 26”21 Bujur Timur- 115⁰ 28”20 Bujur Timur dan 8⁰27”36 Lintang Selatan- 8⁰28”55 Lintang Selatan

Luas wilayah Desa Sidemen yang meliputi 5 (lima) Dusun adalah 4.000 km² atau sebesar 1,61 persen dari luas Anak Desa dan Banjar Dinas Tebola Anak Desa dan Banjar Dinas Budamanis yang terluas

adalah Anak Desa dan Banjar Dinas Tengah dengan 9,4 km², kemudian Anak Desa dan Banjar Dinas Guminten dengan 8, 19km² . Sedangkan Desa terkecil adalah Anak Desa Banjar Dinas Tebola dengan 6,2 km²

Tabel II

Luas Wilayah menurut Anak Desa dan Banjar Dinas

Desa Sidemen terletak antara		
Bujur Timur : 115 ⁰ 26”21 – 115 28”20		
Lintang Selatan : 8 ⁰ 27”36 – 8 28”55		
Batas- batas Desa Desa Sidemen adalah : Sebelah Utara: Desa Sinduwati Sebelah Selatan: Desa Telagatawang dan Desa Wismakerta Sebelah Barat: Desa Sangkan Gunung Sebelah Timur: Desa Antiga Manggis		
Anak Desa dan atau RT	Luas (km ²) Area (Sq Km)	Persentase Percentage
(2)	(3)	(4)

Tabel/Table III

Luas Wilayah menurut Kelas Lereng/Kemiringan
The Area by Slope Class

Kelas Lereng/Kemiringan Slope Class	Luas (Ha) Area	Persen (%) Percent
(1)	(2)	(3)
0-2%	10,27	26,04
3-15%	10,18	25,81
16-40%	13,87	35,17
>40%	5,12	12,99
Jumlah/Total	39,56	100,00

Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu daratan alluvial, dataran bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya ternyata wilayah ini didominasi oleh dataran sebesar 41,34% dan pegungannya sebesar 29,79%.

4. PEMBAHASAN

Otonomi Daerah dalam pembangunan masyarakat di Desa Sidemen mampu menjawab beberapa wawancara yang pertanyakan oleh peneliti, perencanaan tata guna lahan (*Land Use Planning*), penggunaan serta pemanfaatan lahan serta alternatif pola tata guna lahan dengan mempertimbangkan faktor pengembangannya, baik fisik, social, budaya, maupun ekonomi. Tujuan perencanaan tata guna lahan ini yaitu untuk melakukan penentuan pilihan serta penerapan salah satu tata guna lahan yang terbaik sesuai dengan kondisi lahan. Riyadi (2002), dalam pembangunan secara berkala ada, itu khusus untuk pembangunan jalan dan lingkungan di Desa Sidemen.

Pembangunan di Desa Sidemen sudah dilakukan secara berkala terutama penataan jalan yang proses pelaksanaannya menggunakan peraturan desa dikarenakan jalan yang dilalui adalah pengangkutan guna pasir. Perencanaan pembangunan daerah (PPD) membentuk tiga hal pokok yang meliputi perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Riyadi (2002). Proses administrasi publik yang memperhatikan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik; nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon *entrepreneurial government*, dan kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik mememanajemeni urusan-urusan publik. Michael E. Porter (Nugroho, 2008:129) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya.

Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola kebergantungan. Inilah makna strategis dari administrasi publik, dan administrasi publik sangat strategis dalam menghadapi millennium ketiga, Sangat bagus kalo misalnya ada tata ruang jadi pembangunan itu bisa teratur, misalnya dalam hal pembangunan jalan, pembangunan perumahan, dimana sekarang ini banyak wisata, jadi banyak wilayah yang dibangun, sehingga gak ada kebijakan tata ruang, pembangunan jadi tidak teratur”.

Proses pembangunan daerah dapat dilihat dengan tiga cara pandang yang berbeda yaitu pembangunan bagi suatu kota, daerah, serta wilayah sebagai wujud bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan kota, daerah atau wilayah lain. Mengenai jumlah pembangunan hotel yang terdapat di Desa Sidemen terdapat hasil wawancara yang

menyatakan “kalo sekarang hampir sudah 30-an, itu ada hotel, ada villa ada penginapan, jadi kalo yang fasilitasnya standar hotel itu baru 2 saja, jadi lebih banyak villa dan penginapan.”

Pembangunan villa serta hotel yang terjadi di wilayah desa Sidemen sudah direncanakan dan diberikan ijin sesuai ketentuan desa berdasarkan potensi yang ada termasuk dalam tata cara pembangunan yang tidak dapat dilakukan berdekatan dengan jalur hijau desa. Melalui penelitian yang dilakukan pembangunan villa berada di daerah persawahan dan tebing dapat diuraikan: kalo pembangunan di wilayah tebing itu tidak ada, kalo di wilayah pinggiran sungai itu kemungkinan hampir 1%, kalo di persawahan hampir banyak sekarang dipake untuk villa sama penginapan, itu paling banyak jumlahnya sekitar 5% jadi lahan sawah dipake untuk villa atau penginapan

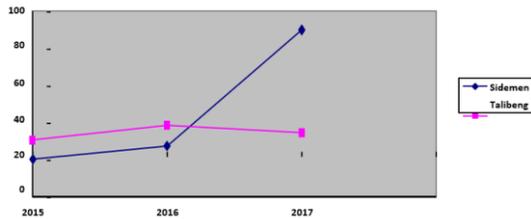
Wilayah konsentrasi pengembangan merupakan wilayah tertentu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah melalui Bappeda Kabupaten/Kota sebagai lokasi perencanaan pembangunan hotel dan villa, dapat dijabarkan melalui diagram:

Diagram I
Wilayah Pembangunan Villa dan Hotel



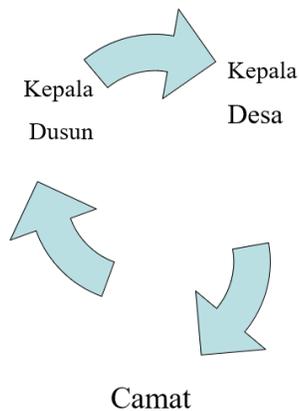
Pemanfaatan tata ruang wilayah dalam pembangunan hotel dan villa memberikan angin segar dalam pembangunan wilayah pedesaan, namun seiring berjalannya waktu penggunaan tata ruang khususnya pembangunan di kabupaten Karangasem yaitu di wilayah Sidemen dan Talibeng pembangunan hotel dan villa dilakukan atas ijin yang berdasarkan Perda No 17 tahun 2012, memberikan ijin pembangunan hotel dan villa tanpa merusak wilayah tebing dan persawahan.

Diagram II
Pembangunan Wilayah Sidemen dan Talibeng



Berdasarkan hasil penelitian di kedua wilayah tersebut, pembangunan Hotel dan villa di tahun 2015 sampai 2017, maka daerah yang paling banyak pembangunan hotel dan villa berada di wilayah desa Sidemen, rata-rata tujuan pembangunan hotel dan villa masyarakat Sidemen sebagai penunjang kebutuhan perekonomian, terkait dengan pelanggaran pihak kecamatan melakukan koordinasi langsung dengan satpol PP kabupaten untuk menindak lanjuti kembali pembangunan tanpa ijin.

Diagram III
Alur Ijin Pembangunan Masyarakat Kecamatan Sidemen Berdasarkan Hasil Wawancara DPRD Karangasem



Proses ijin pembangunan di kecamatan Sidemen sudah berlangsung berdasarkan atas prosedur yang berlaku masyarakat yang ingin membangun harus meminta rekomendasi dengan kepala dusun, kepala desa serta camat, sehingga berdasarkan prosedur pengurusan pembangunan masyarakat sidemen dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, beberapa bukti pembangunan villa yang sudah dibangun di wilayah Desa Sidemen dan Talibeng.

Gambar I



Observasi yang dilakukan di lapangan menemukan beberapa bukti adanya pembangunan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terkait dengan pembangunan villa di wilayah kecamatan Sidemen, villa yang dibangun berada dikawasan persawahan dan beberapa petunjuk villa yang bisa ditemukan dilapangan memberikan bukti masih banyak bangunan villa, hotel, yang dibangun dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur pariwisata di kecamatan Sidemen, secara keseluruhan dapat di nyatakan bahwa alih fungsi sawah masih belum bisa ditekan secara maksimal di kecamatan Sidemen, berhubung tanah yang dibangun merupakan tanah milik pribadi yang semata-mata alih fungsi tidak dapat ditekan secara maksimal oleh pemerintah desa hanya saja yang dilakukan adalah pemberian ijin sesuai dengan prosedur yang berlaku, dari pemberian ijin pemerintah desa bisa memberikan ijin bangunan dengan ketentuan dimana masyarakat yang membangun di daerah persawahan tidak bisa membangun sembarangan, harus sesuai dengan prosedur yang dijelaskan sesuai dengan diagram III terdapat alur ijin pembangunan di wilayah kecamatan Sidemen.

5. KESIMPULAN

Perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Pembangunan yang terdapat di wilayah kecamatan Sidemen terdapat pembangunan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terkait dengan pembangunan villa di wilayah kecamatan Sidemen adapun langkah yang dilakukan pemerintah dalam pemberian ijin kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang terjadi adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk menghindari pembangunan yang menggunakan lahan persawahan.

Proses ijin pembangunan diawasi oleh tiga Lembaga desa dimana terdapat kepala desa, kepala dusun, serta camat yang melakukan pengawasan

dalam proses ijin pembangunan villa di kecamatan Sidemen, walaupun demikian terdapat juga masyarakat yang masih ditemukan membangun di wilayah persawahan, dengan adanya langkah pengawasan yang implementasikan berdasarkan Perda No 17 Tahun 2012-2032, pembangunan diwilayah persawahan dan tebing dapat di

minimalisirkan berdasarkan atas proses ijin yang sudah dilakukan dikecamatan Sidemen, selama pembangunan yang dilakukan tidak menyalahi aturan maka pembangunan dikecamatan Sidemen bersifat legal berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J, 1998 *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, Jakarta: UI Press.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus.2010.*Manajemen Pelayanan Publik*.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Fiona, F (2006) *Critical Succes Factors for Enterprise Resource Planning Implementation and Upgrade*, *Journal of Computer Information Systems, University of Nebraska* 68588 – 0491.
- Halim, Abdul (2004) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant, Dr. (2002) *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Pramusinto, Agus, Dr.Prof. *Seri Kebijakan Publik Indonesia dalam Demokrasi & Good Governance*. Yogyakarta : Institute of Governance and Public Affairs (IGPA).
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES Sugiyono,Dr,2010, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Drs Robinson.2005.*Perencanaan Pembangunan Wilayah*.Jakarta:PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2004) *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo